



BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Gedung Graha BNPB Jalan Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur 13120

Telepon: 021 -2982 7766, Faksimile: 021 - 2128 1200

Situs: <http://www.bnph.go.id>

BNPB

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini, Selasa Tanggal 18 Maret 2025 bertempat di Ruang 204 Gedung INA-DRTG Badan Nasional Penanggulangan Bencana Jl. Anyar No. 37, Kelurahan Tangkil, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat pada Pukul 09.00 WIB s.d. 12.00 WIB telah dilaksanakan Sidang Komisi Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang dihadiri oleh peserta dari Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, BNPB, BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota. Sidang komisi ini menghasilkan **keepakatan-keepakatan dalam bentuk rencana aksi** yang dilaksanakan pada Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) menjadi hal yang penting melibatkan multipihak dalam proses penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi yang diamanatkan dalam Peraturan BNPB Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana untuk selanjutnya mendorong regulasi R3P dalam bentuk Peraturan Presiden.
2. Pemulihan pascabencana secara menyeluruh 5 sektor (perumahan, infrastruktur, sosial, ekonomi, lintas sektor) melibatkan multipihak.
3. Mendorong terbentuknya klaster pemulihan dan pembentukan kelompok kerja (pokja) pemulihan pascabencana (pusat dan daerah) yang selanjutnya akan diatur oleh BNPB dalam bentuk Peraturan BNPB sebagai wadah kolaborasi multipihak.
4. Penguatan bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) di BPBD melalui penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan bencana bidang RR yang mengakomodir lima sektor pemulihan pascabencana guna mewujudkan proses pemulihan secara komprehensif, terarah, dan berkelanjutan.
5. Kepemimpinan yang kuat di Daerah dalam pelaksanaan pemulihan pascabencana.

Demikian berita acara kesepakatan bersama ini dibuat untuk dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagaimana mestinya.

Kabupaten Bogor, 18 Maret 2025

Pimpinan Sidang Komisi

Rehabilitasi dan Rekonstruksi

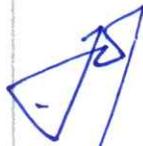
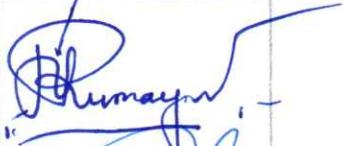
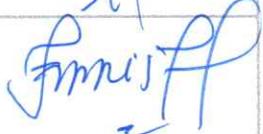


Jarwansah, S.Pd, M.Ap.,M.M

Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

NIP. 19700830 199512 1 003

PERWAKILAN NARASUMBER DAN PESERTA SIDANG KOMISI

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	Jarwansah, S.Pd, M.Ap.,M.M	Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	BNPB	
2.	Dr. Lilik Kurniawan, ST., M.Si	Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial	Kemenko Bidang PMK	
3.	Ir. Ibnu Asur, M.M	Direktur Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	BNPB	
4.	Dra, Eny Supartini, M.M	Direktur Pemulihan Peningkatan Sosial Ekonomi dan Sumber Daya Alam	BNPB	
5	Monalisa Herawati Rumayar, S.P.t, M.Si	Asisten Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	BNPB	
6	Puspita Dewi Pratiwi Fitrah, S.STP	Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah	Kemendagri	
7	Dr. Asep Supriatna, SE, M.M	Kasubdit Pemulihan dan Peningkatan Produktivitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan	BNPB	
8	Luqmanul Hakim, M.T	Kasubdit Pemulihan dan Peningkatan Fasilitas Umum	BNPB	
9	Priska Saragih, S.K.M., M.K.M.	Kasubdit Perencanaan Pendanaan	BNPB	
10	Ir. Erwin, S.T., M.Si	Kasubdit Inventarisasi dan Analisis Kebutuhan	BNPB	



11	Budi Hartati	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	BPBD Provinsi DKI	
12	A. Rizal Efendi	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	BPBD Kota Tangerang	
13	Roslina	Perencana Ahli Muda	BPBD Kabupaten Bekasi	





BNPB

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Gedung Graha BNPB Jalan Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur 13120

Telepon: 021 -2982 7766, Faksimile: 021 - 2128 1200

Situs: <http://www.bnpb.go.id>

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini, Rabu Tanggal 19 Maret 2025 bertempat di Gedung Ina-DRTG Sentul, Jl. Anyar No.37, Tangkil, Kec. Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Ruang Meeting 102, Pk. (09.00 s.d. 12.00 WIB), telah dilaksanakan Sidang Komisi Logistik dan Peralatan yang dihadiri oleh peserta dari BPBD Provinsi/Kabupaten, Pemerintah Daerah, Kementerian Dalam Negeri, dan OCHA Indonesia. Sidang komisi menghasilkan kesepakatan-kesepakatan dalam bentuk **rencana aksi yang dilaksanakan pada Tahun 2025**, sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah mengimplementasikan Petunjuk Pelaksanaan Nomor 01 Tahun 2024 tentang Standar Minimal Kebutuhan Logistik dan Peralatan dengan didukung Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri;
2. Pemerintah Daerah memastikan ketersediaan sarana penyimpanan dan Sumber Daya Manusia pengelola gudang logistik dan peralatan;
3. Pemerintah daerah membentuk klaster logistik di tingkat daerah didukung dengan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri;

Demikian berita acara kesepakatan bersama ini dibuat untuk dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagaimana mestinya.

Bogor, 19 Maret 2025

Pimpinan Sidang Komisi

Logistik dan Peralatan

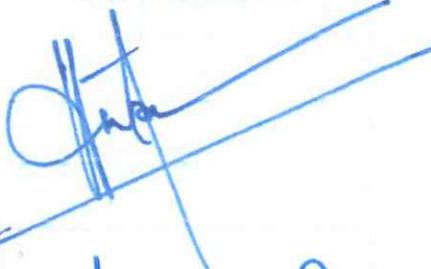


Jarwansah, S.Pd., M.A.P., M.M

Plt. Deputi Logistik dan Peralatan

NIP. 19700830 199512 1 003

PERWAKILAN NARASUMBER DAN PESERTA SIDANG KOMISI

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	Nadhirah Seha Nur, S.P., M.Si	Direktur Pengelolaan Logistik dan Peralatan	BNPB	
2.	Drs. Edy Suharmanto, M.Si	Direktur Manajemen Penanggulan gan Bencana dan Kebakaran	Kementerian Dalam Negeri	
3.	Erry Prawisuda, S.E	Kasubdit Kemitraan	BNPB	
4.	Titik Moektijasih	Humanitarian Affairs Analyst	OCHA Indonesia	
5.	Agus Suparno, S.Ag., MM.	Sekretaris Pelaksana	BPBD Kabupaten Bekasi	
6.	Usep Suodana, S.Sos.M.Si	Penata Kebencanaan Ahli Muda.	BPBD Provinsi Jawa Barat	





BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Gedung Graha BNPB Jalan Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur 13120
Telepon: 021 -2982 7766, Faksimile: 021 - 2128 1200
Situs: <http://www.bnpb.go.id>

BNPB

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini, Selasa Tanggal 18 Maret 2025 bertempat di Gedung Ina-DRTG Sentul, Jl. Anyar No.37, Tangkil, Kec. Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Ruang 106, Pukul 08.00 s.d. 12.00 WIB, telah dilaksanakan Sidang Komisi Darurat Bencana yang dihadiri oleh peserta dari BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota, Panglima Komando Daerah Militer, Komandan Komando Resort Militer dan Kepala Kepolisian Daerah. Sidang komisi menghasilkan kesepakatan-kesepakatan dalam bentuk **rencana aksi yang dilaksanakan pada Tahun 2025**, sebagai berikut:

1. BNPB sesuai tugas dan fungsinya akan terus memberikan pendampingan, dukungan dan bantuan secara efektif, terkoordinasi, dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, guna meminimalkan dampak bencana terhadap masyarakat dan memperkuat ketangguhan daerah;
2. BPBD Provinsi siap melakukan pendampingan di Kabupaten/Kota yang terdampak bencana untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana. BPBD akan memberikan dukungan dan bantuan yang efektif dan efisien dalam penanganan bencana di Kabupaten/Kota;
3. BPBD Kabupaten/Kota siap meningkatkan kapasitas daerah dengan memperkuat kemampuan personil, masyarakat dan pemerintah daerah dalam menghadapi, merespons, serta memulihkan diri dari bencana dalam aspek pengetahuan, keterampilan, sumber daya serta menjalankan manajemen penanganan darurat bencana agar penanganan darurat bencana dapat berjalan dengan baik;
4. BUMN selama ini telah berperan dalam penanggulangan bencana melalui bantuan pada saat terjadi bencana, dengan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sehingga akan terus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat khususnya yang terdampak bencana.

Demikian berita acara kesepakatan bersama ini dibuat untuk dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagaimana mestinya.

Bogor, 18 Maret 2025
Pimpinan Sidang Komisi
Darurat Bencana



Mayor Jenderal TNI Lukmansyah, M.Tr. (Han)
NRP. 32588

PERWAKILAN NARASUMBER DAN PESERTA SIDANG KOMISI

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	Agus Riyanto, S.T., M.M.	Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat	BNPB	
2.	Nelwan Harahap, S.P., M.Tr.A.P.	Direktur Fasilitas Penanganan Korban dan Pengungsi	BNPB	
3.	Andria Yuferryzal, S.E., M.Si.	Direktur Dukungan Infrastruktur Darurat	BNPB	
4.	Bambang Surya Putra, M.Kom	Kepala Pusat Pengendalian Operasi	BNPB	
5.	Satriyo Nurseno, S.STP, M.IP	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	BPBD Provinsi Jawa Timur	
6.	Fahrudin	Koordinator Bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	Kementerian BUMN	



BNPB

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Gedung Graha BNPB Jalan Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur 13120

Telepon: 021 -2982 7766, Faksimile: 021 - 2128 1200

Situs: <http://www.bnpb.go.id>

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini, Rabu tanggal 19 Maret 2025 bertempat di Gedung Ina-DRTG Sentul, Jalan Anyar Nomor 37, Tangkil, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Ruang Tangguh 101 Ina DRTG Sentul, pukul 09.00 s.d. 12.00 WIB, telah dilaksanakan Sidang Komisi Pra Bencana yang dihadiri oleh peserta dari BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota, Akademisi, dan Praktisi Kebencanaan. Sidang komisi menghasilkan kesepakatan-kesepakatan dalam bentuk **rencana aksi yang dilaksanakan mulai tahun 2025**, sebagai berikut:

1. BNPB dan BPBD berkomitmen untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dengan unsur multi-helix sesuai kepentingannya guna penguatan upaya pengurangan risiko bencana di daerah.
2. BNPB dan BPBD akan terus mendorong pelaksanaan peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah melalui pelaksanaan kegiatan Hari Kesiapsiagaan Bencana pada tanggal 26 April dan pelaksanaan kegiatan bulan Pengurangan Risiko Bencana pada bulan Oktober setiap tahunnya;
3. BNPB dan BPBD akan mengidentifikasi dan mereview NSPK pra bencana untuk pengembangan dan penguatan aspek regulasi pra bencana kedepan.
4. BPBD harus meningkatkan partisipasi aktif dalam Musrenbangnas, dalam rangka mengusulkan rancangan kegiatan pra bencana sebagai kegiatan prioritas pembangunan nasional, terutama untuk upaya mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini yang sejalan dengan semangat Asta Cita Pemerintah.
5. BPBD terus memperkuat kerjasama dengan unsur Pemerintah Daerah untuk penguatan implementasi pemenuhan SPM sub urusan pra bencana;
6. BNPB dan BPBD akan meningkatkan akses terhadap pendanaan untuk program pencegahan, serta memanfaatkan sumber daya lokal secara efektif untuk pengurangan risiko bencana;
7. Untuk upaya mitigasi bencana:
 - a. BNPB berkolaborasi dengan BPBD didukung oleh unsur multi-helix dalam mengimplementasikan upaya mitigasi tepat guna dan efektif dalam mengurangi dampak bencana mengacu kepada historis kejadian bencana, kajian risiko bencana serta potensi dampak bencana.
 - b. BPBD harus segera melakukan koordinasi bersama unsur pemerintah daerah terkait untuk penegakan pemanfaatan ruang terutama untuk wilayah penyangga dan wilayah berisiko tinggi bencana.
 - c. BNPB dan BPBD meningkatkan kerjasama multi-helix dalam penyelenggaraan penguatan mitigasi struktur seperti infrastruktur tahan gempa dan mitigasi vegetatif serta mitigasi non struktur seperti sosialisasi, edukasi, perencanaan rambu bencana, penentuan jalur evakuasi dan tempat evakuasi.

- d. BPBD segera melakukan koordinasi untuk identifikasi kebutuhan implementasi mitigasi bencana banjir dari hulu hingga hilir (lintas batas administrasi), diantaranya: penguatan daerah resapan banjir melalui : upaya reboisasi, sumur resapan, revitalisasi embung; evaluasi kesehatan tanggul dan infrastruktur kritis di sepanjang bantaran sungai.
8. Untuk upaya kesiapsiagaan bencana:
 - a. BPBD segera mendorong identifikasi kesiapsiagaan berbasis desa/kelurahan melalui Penilaian Ketangguhan Desa (PKD), untuk menghasilkan rekomendasi dan strategi perencanaan pembangunan desa/kelurahan, termasuk aksi atau tindakan, sesuai potensi risiko bencana yang ada.
 - b. BPBD diminta untuk berperan aktif dalam memberikan pendampingan penginputan PKD dalam Indeks Desa (ID) di semua desa, serta memastikan pelaksanaannya.
 9. Untuk upaya peringatan dini bencana:
 - a. BNPB dan BPBD harus melakukan identifikasi kebutuhan dan ketersediaan mekanisme dan instrumen pemantauan serta diseminasi peringatan dini bencana untuk setiap Kabupaten/Kota, terutama untuk ancaman hidrometeorologi, longsor, gunung api, dan tsunami.
 - b. BNPB dan BPBD harus menetapkan alur koordinasi pemantauan peringatan dini bahaya bersama pihak terkait sebagai dasar penguatan diseminasi peringatan dini bencana berbasis aksi dini sebagai bagian dari respon terhadap peringatan dini bencana.
 - c. BNPB dan BPBD harus mampu mengimplementasikan peringatan dini (*end to end system*/hulu-hilir) serta mampu mengembangkan sistem peringatan dini yang modern, tepat guna dan inklusif sesuai dengan risiko wilayah dan budaya lokal.
 - d. BNPB dan BPBD terus mendukung proses penyusunan rancangan kebijakan presiden untuk penguatan kolaborasi sistem peringatan dini bencana.

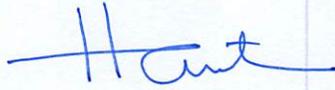
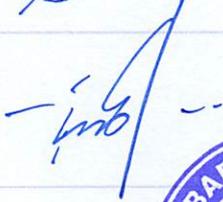
Demikian berita acara kesepakatan bersama ini dibuat untuk dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagaimana mestinya.

Bogor, 19 Maret 2025
Pimpinan Sidang Komisi
Pra Bencana



Dra. Prasinta Dewi, M.A.P.
Deputi Bidang Pencegahan
NIP. 19650920 199102 2 001

**PERWAKILAN NARASUMBER DAN PESERTA
SIDANG KOMISI PRA BENCANA**

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	Berton Suar Pelita Panjaitan, S.K.M., M.H.M., Ph.D	Direktur Mitigasi	BNPB	
2.	Drs. Pangarso Suryotomo	Direktur Kesiapsiagaan	BNPB	
3.	Dr. Ir. Afrial Rosya, MA, M.Si	Direktur Peringatan Dini	BNPB	
4.	Dr. Dwi Rudy Hartoyo, S.Sos., M.Si.	Direktur Advokasi dan Kerjasama Desa dan Perdesaan	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	
5.	Ir. Bambang Munadjat, ME., KTT., POM., GMMDP	Unsur Pengarah	BNPB	
6.	Prof. Harkunti P Rahayu	Ketua Umum	Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI)	
7.	Perdinan, Ph.D, MNRE	Akademisi Departemen Geofisika dan Meteorologi	IPB	
8.	Win-endrias	Kasubag Umum	BPBD Provinsi DKI Jakarta	
9.	Budi Budiman Wahyu, ST., MT.	Penata Kebencanaan Ahli Muda	BPBD Provinsi Jawa Barat	





BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Gedung Graha BNPB Jalan Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur 13120

Telepon: 021 -2982 7766, Faksimile: 021 - 2128 1200

Situs: <http://www.bnph.go.id>

BNPB

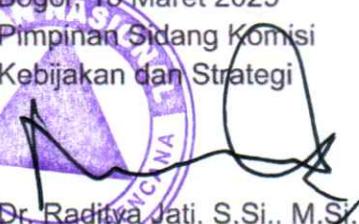
BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini, Selasa tanggal 18 Maret 2025 bertempat di Gedung Ina-DRTG Sentul, Jalan Anyar Nomor 37, Tangkil, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Ruang Tangguh 102 Ina DRTG Sentul, pukul 09.00 s.d. 12.00 WIB, telah dilaksanakan Sidang Komisi Kebijakan dan Strategi yang dihadiri oleh peserta dari BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota, Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Dinas PUPR Provinsi/Kabupaten/Kota. Sidang komisi menghasilkan kesepakatan-kesepakatan dalam bentuk **rencana aksi yang dilaksanakan pada tahun 2025**, sebagai berikut:

1. Sepakat untuk menyusun rencana aksi pengendalian bencana banjir dan longsor lintas wilayah administrasi dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan rencana tata ruang tahun 2025-2029 yang akan dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas melibatkan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
2. Rehabilitasi lahan kritis DAS melalui vegetatif dan sipil teknis, pada kawasan hutan oleh pemangku kawasan dan area penggunaan lain oleh Kementerian/Lembaga pemegang kewenangan maupun Pemerintah Daerah, sesuai dengan Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan DAS;
3. Perkuatan infrastruktur pengendalian banjir dan teknologi pemantauan banjir seperti pembebasan lahan, normalisasi sungai, penguatan embung, bendungan, polder, sumur resapan, bangunan konservasi dan sistem informasi data oleh Kementerian PU dan Pemerintah Daerah;
4. BPBD harus secara proaktif terlibat dalam penyusunan rencana tata ruang dan implementasinya secara konsisten, serta mendukung penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang untuk menurunkan risiko bencana.
5. Pemerintah dan Pemerintah daerah didorong untuk mengelola dan mengatur pembangunan di daerah aliran sungai pada sektor hulu, tengah dan hilir melalui peningkatan kawasan resapan air; konservasi tanah dan air; dan peningkatan kapasitas drainase dengan pendekatan Zero Delta Q.
6. Pemerintah dan Pemerintah daerah memperkuat kolaborasi lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan dalam membangun program-program tata kelola air dalam antisipasi bencana banjir dan longsor, dengan pendekatan kompensasi seperti halnya skema insentif pajak, pembayaran kompensasi lingkungan, investasi infrastruktur hijau, dan lain-lain.

Demikian berita acara kesepakatan bersama ini dibuat untuk dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagaimana mestinya.

Bogor, 18 Maret 2025
Pimpinan Sidang Komisi
Kebijakan dan Strategi



Dr. Raditya Jati, S.Si., M.Si.
Deputi Sistem dan Strategi
NIP. 19691008199701100



PERWAKILAN NARASUMBER DAN PESERTA SIDANG KOMISI

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	Dr. Raditya Jati, S.Si, M.Si	Deputi Bidang Sistem dan Strategi	BNPB	
2.	Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP	Perencana Ahli Utama	Kementerian PPN/Bappenas	
3.	Agus Sutanto, ST, M.Sc	Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang , Ditjen Pengendalian dan Penertiban Tata Ruang	Kementerian ATR/BPN	
4.	Nurul Iftitah, S. Hut., M.Si.	Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian DAS	Kementerian Kehutanan	
5.	Dr. Luki Subehi, M.Sc	Kepala Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air	BRIN	
6.	Dr. Deni Septiadi	Ketua Pokja Hidrometeorologi	IABI	
7.	Faliansyah, S.T., M.Dev.Plg	Kasubdit Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai	Kementerian Pekerjaan Umum	
8.	Dr. Ir. Udrek, S.E., MSc.	Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana	BNPB	





BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Gedung Graha BNPB Jalan Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur 13120

Telepon: 021 -2982 7766, Faksimile: 021 - 2128 1200

Situs: <http://www.bnpb.go.id>

BNPB

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini, Rabu Tanggal 19 Maret 2025 bertempat di Gedung Ina-DRTG Sentul, Jl. Anyar No.37, Tangkil, Kec. Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Ruang Tangguh 106 Ina DRTG Sentul, Pk. (09.00 s.d. 12.00 WIB), telah dilaksanakan Sidang Komisi Akuntabilitas yang dihadiri oleh peserta dari Sekretaris BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota. Sidang komisi menghasilkan kesepakatan-kesepakatan dalam bentuk **rencana aksi yang dilaksanakan pada Tahun 2025**, sebagai berikut:

1. BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota berkomitmen mengelola Dana Siap Pakai, Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi secara akuntabel dan menyampaikan pertanggungjawaban secara tepat waktu.
2. BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) serta hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota berkomitmen menerapkan tata kelola penanggulangan bencana yang efektif, efisien dan akuntabel sesuai dengan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN).

Demikian berita acara kesepakatan bersama ini dibuat untuk dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagaimana mestinya.

Bogor, 19 Maret 2025

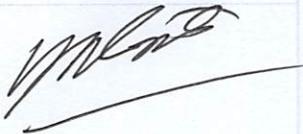
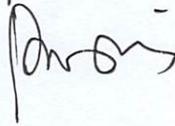
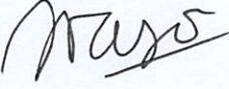
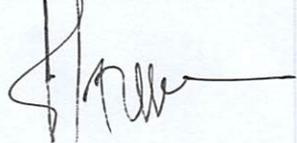
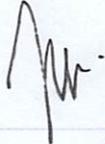
Pimpinan Sidang Komisi Akuntabilitas

Inspektur Utama BNPB,

Yulianto, Ak., M.M.

NIP. 196507181986031001

PERWAKILAN NARASUMBER DAN PESERTA SIDANG KOMISI AKUNTABILITAS

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	Yulianto, Ak., M.M.	Inspektur Utama	BNPB	
2.	Agus Hardja Santana, AK., MM, CA, CRMP, CRGP	Inspektur II	BNPB	
3.	Kombes. Pol. Deden Nurhidayatullah, S.H., S.I.K., M.H., CPHR.	Plt. Inspektur III	BNPB	
4.	Sidi Purnomo, Ak., Msi., CA., CGAP., CRMP., CRGP	Direktur Pengawasan Bidang Sosial dan Penanganan Bencana	BPKP	
5.	Rita Helbra Tenrini	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan	
6.	Ira Silviana Suseno, S.T.,S.E.,M.Ak.,CA.,C RMP.,CFrA.	Auditor Ahli Madya	BNPB	
7.	Drs. Ponco Budi Santoso, AP	Sekretaris BPBD	BPBD Tangerang Selatan	
8.	Dani Saputra, S.H., M.AP.	Kepala Subbagian Keuangan	BPBD Provinsi Jawa Barat	





BNPB

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Gedung Graha BNPB Jalan Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur 13120

Telepon: 021-2982 7793, Faksimile: 021-2128 1200

Situs: <http://www.bnpb.go.id>

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini, Selasa Tanggal 18 Maret 2025 bertempat di Gedung Ina-DRTG Sentul, Jl. Anyar No.37, Tangkil, Kec. Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Ruang Tangguh 101 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana INA-DRTG, Sentul, Pukul (09.00 s.d. 12.00 WIB), telah dilaksanakan Sidang Komisi Tata Kelola Penanggulangan Bencana yang dihadiri oleh peserta dari Kepala Pelaksana dan Sekretaris BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota. Sidang komisi menghasilkan kesepakatan-kesepakatan dalam bentuk **rencana aksi yang dilaksanakan pada Tahun 2025**, sebagai berikut:

1. Memfokuskan perspektif penanggulangan bencana dari tanggap darurat ke investasi prabencana melalui: peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi, peningkatan dan pengintegrasian layanan peringatan dini, peningkatan ketahanan infrastruktur, peningkatan resiliensi masyarakat melalui pemberdayaan, integrasi penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim.
2. Peningkatan kualitas layanan kedaruratan melalui peningkatan waktu respon tanggap darurat serta peningkatan kecepatan dan ketepatan distribusi logistik dan peningkatan upaya pemulihan pascabencana dengan tidak hanya berfokus pada bidang fisik namun juga memperhatikan pemulihan dan peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak bencana.
3. Perlunya *early warning system* dibarengi dengan *early action* dengan melibatkan unsur *pentahelix*. *Early action* dilakukan melalui perhitungan yang cepat dan tepat dengan menerjemahkan dan menganalisis tindakan yang akan dilakukan pada saat terjadi bencana berdasarkan ketersediaan informasi pada *early warning system*.
4. Implementasi kebijakan penanggulangan bencana perlu didukung oleh transformasi tata kelola melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha, penguatan pendanaan berbasis risiko dan mekanisme inovatif dan pemanfaatan teknologi dan inovasi.
5. Strategi pendanaan bagi pembiayaan risiko bencana yang memadai dan berkelanjutan, implementasi dan optimalisasi skema transfer risiko melalui skema asuransi, perbaikan pengelolaan fiskal bencana dan saluran distribusi dana yang optimal dan transparan serta mendorong keterlibatan peran Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat dalam skema pembiayaan yang lebih luas dan pengembangan pasar asuransi domestik.
6. Pemerintah Pusat dan Daerah perlu memastikan keselarasan dokumen perencanaan pembangunan khususnya terkait penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dengan mengacu pada Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029.

7. Dalam rangka...

7. Dalam rangka pengembangan karier pejabat fungsional di bidang kebencanaan, BNPB sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Analisis Kebencanaan akan:
 - a. Melaksanakan Uji Kompetensi pada tahun 2025;
 - b. Menetapkan Formasi Nasional Jabatan Fungsional Analisis Kebencanaan untuk seluruh Instansi Pusat dan Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - c. Melaksanakan Inpassing Jabatan Fungsional Kebencanaan pada Tahun 2026; dan
 - d. Mendorong percepatan Penetapan Tunjangan Fungsional Jabatan Fungsional di Bidang Kebencanaan.
8. Dalam rangka pendataan pejabat Fungsional di Bidang Kebencanaan pada instansi Pusat dan Daerah segera menyampaikan data pemangku Jabatan Fungsional di bidang kebencanaan termasuk dengan CPNS dan PPPK 2025 sesuai format pada tautan <https://bit.ly/43PVA6o> dan disampaikan ke BNPB paling lambat tanggal 31 Mei 2025 melalui email organisasibnpb@gmail.com.

Demikian berita acara kesepakatan bersama ini dibuat untuk dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagaimana mestinya.

Bogor, 18 Maret 2025

Pimpinan Sidang Komisi

Tata Kelola Penanggulangan Bencana

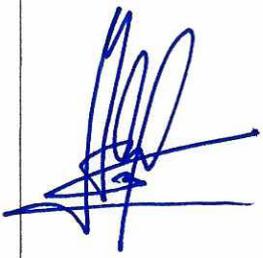


Dr. Rustian, S.Si., Apt., M.Kes.

Sekretaris Utama

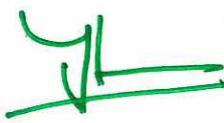
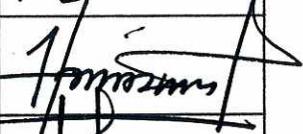
NIP. 196901011998031004

PERWAKILAN NARASUMBER DAN PESERTA SIDANG KOMISI

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	TANDA TANGAN
NARASUMBER				
1.	Ir. Medrilzam, MPE., Ph.D	Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas)	
2.	Diah Dwi Utami, S.P., M.Si.	Plt. Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Kementerian Keuangan	
3.	Fajar Hasri Ramadhana	Kepala Subdirektorat Anggaran Bidang Riset, Inovasi dan Kebencanaan	Kementerian Keuangan	
4.	Arintha Valentysya Putri, S.M.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Kementerian PANRB	
MODERATOR				
1.	Ir. Fatchul Hadi, Dipl. H.E.	Tenaga Ahli	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	



PERWAKILAN PESERTA SIDANG KOMISI

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	TANDA TANGAN
PESERTA				
1.	Dra. Andi Eviana, M.Si.	Kepala Biro Perencanaan	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	
2.	Irma Dewi Rismayati, S.IP., M.A.	Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Kerja Sama	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	
3.	Pambudi Suroyo Jati, S.E., M.Ak.	Plt. Kepala Biro Keuangan	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	
4.	Yahya Djunaid, S.E., M.Si.	Plt. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	
5.	Kheriawan, S.Pd.I., M.M.	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	
6.	Ira Silviana Suseno, S.E., M.Ak., CA., CRMP., CFrA.	Auditor Ahli Madya	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	
7.	Anne Hermadianne Adnan, S.Sos, MA	Plt. Kepala Pelaksana	BPBD Provinsi Jawa Barat	
8.	Ponco	Sekretaris Badan	BPBD Kota Tangerang Selatan	
9.	Hidayatulloh	Kepala Pelaksana	BPBD Kota Bogor	



Penyampaian Hasil Sidang Komisi Rakornas PB Tahun 2025

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
20 Maret 2025

a

Komitmen Pemerintah dan Pemda mengintegrasikan kebijakan PB dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah

b

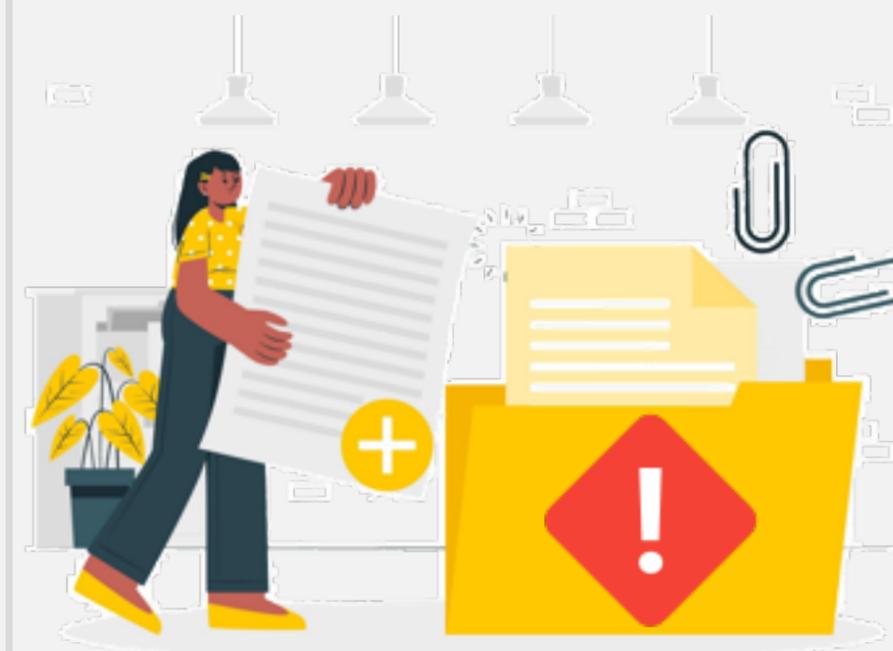
Peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi bencana melalui peningkatan ketahanan infrastruktur dan resiliensi masyarakat

c

Penguatan layanan peringatan dini dan aksi dini

d

Peningkatan integrasi tata kelola PB dengan adaptasi perubahan iklim



a

Perbaiki pengelolaan fiskal bencana dan distribusi dana yang optimal dan transparan

b

Optimalisasi skema transfer risiko melalui asuransi bencana

c

Keterlibatan sektor swasta dalam pembiayaan penanggulangan bencana.



Implementasi Strategi Pengurangan Risiko Banjir dan Tanah Longsor Melalui Pengembangan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola DAS

a Penyusunan rencana aksi pengendalian banjir dan longsor lintas wilayah administratif di bawah koordinasi Kementerian PPN/Bappenas.

b Rehabilitasi lahan kritis di DAS melalui upaya vegetatif dan sipil teknis sesuai dengan Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan DAS

c Penguatan infrastruktur pengendalian banjir, termasuk normalisasi sungai, embung, bendungan, sistem *polder*, dan sumur resapan.

d Pemanfaatan teknologi pemantauan banjir untuk meningkatkan efektivitas peringatan dini.



a

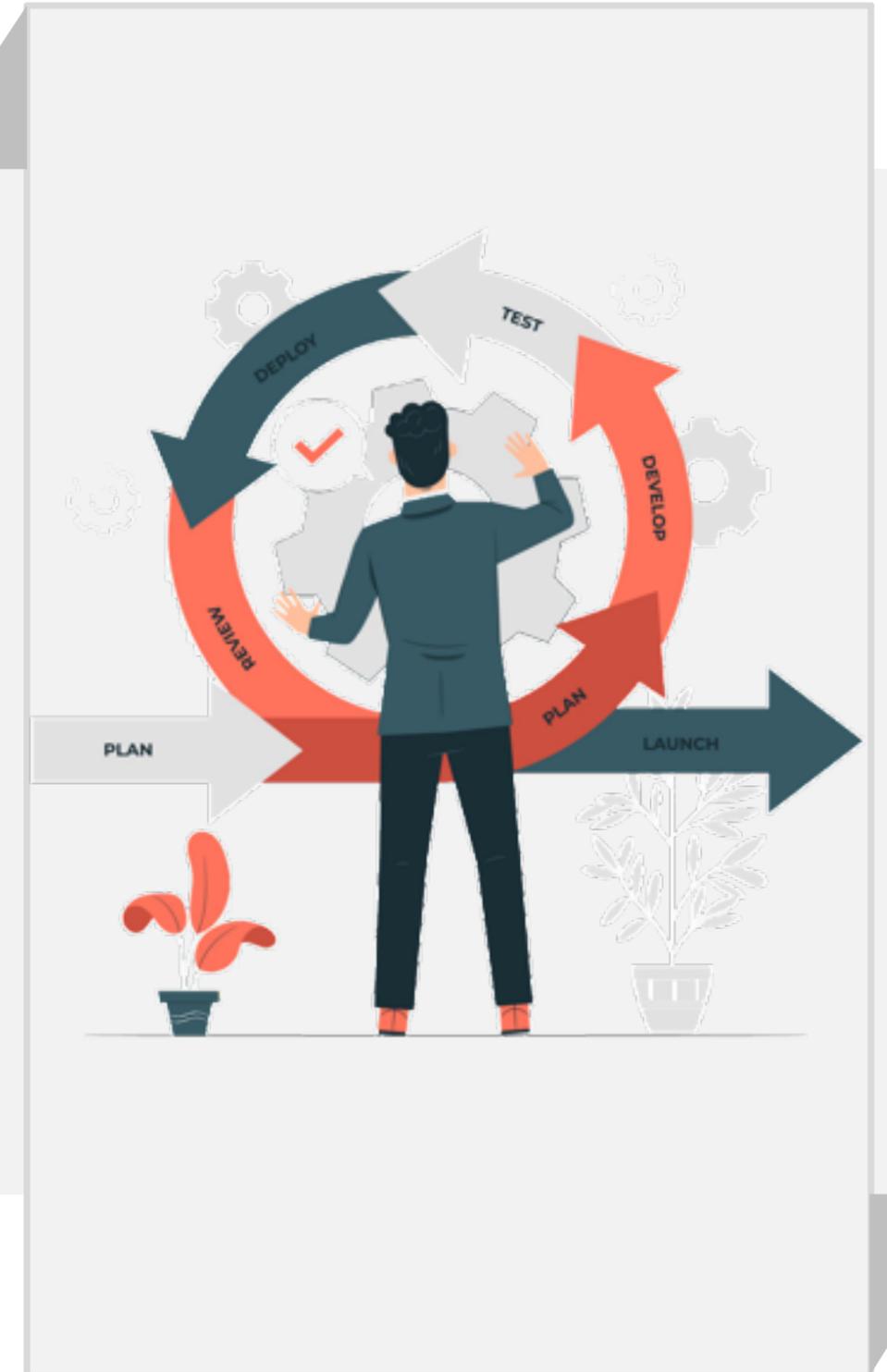
BNPb akan terus memberikan pendampingan, dukungan, dan bantuan secara efektif, terkoordinasi, dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku kepada daerah terdampak bencana.

b

Pemerintah daerah harus meningkatkan kapasitas lembaga, personel, dan masyarakat dalam respons darurat bencana

c

BUMN akan terus berperan dalam mendukung penanggulangan bencana melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).



a

Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) akan diintegrasikan dalam regulasi nasional berupa Peraturan Presiden.

b

Pembentukan klaster pemulihan dan kelompok kerja pemulihan pascabencana, baik di tingkat pusat maupun daerah.

c

Advokasi Pemuatan bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi di dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk memastikan pemulihan yang lebih cepat dan efektif.



a

Mengimplementasikan Petunjuk Pelaksanaan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Standar Minimal Kebutuhan Logistik dan Peralatan dengan didukung Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri

b

Memastikan ketersediaan sarana penyimpanan dan Sumber Daya Manusia pengelola gudang logistik dan peralatan

c

Membentuk klaster logistik di tingkat daerah didukung dengan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri



a

Mengelola Dana Siap Pakai (DSP) dan Dana Hibah secara akuntabel

b

Menindaklanjuti hasil audit dari BPK dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

c

Menerapkan tata kelola penanggulangan bencana yang efektif, efisien dan akuntabel sesuai dengan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN)



TERIMA KASIH



BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Graha BNPB Jl. Pramuka Kav. 38 Jakarta Timur 13120

 021 2982 7793

 021 2128 1200

 0812 971 000 69

 Call Center: 117

 ppid@bnpb.go.id

 persuratan@bnpb.go.id

 gis.bnpb.go.id

 dibi.bnpb.go.id

 data.bnpb.go.id

 www.bnpb.go.id

 @infoBencanaBNPB

 BNPB_Indonesia

 @bnpbindonesia

 @BNPB_Indonesia

 BNPB Indonesia

 Satu Data Bencana

 tv.bnpb.go.id

 inarisk.bnpb.go.id